



NOTA DINAS
No. 20 /IJ-IND.2/PW/1/2024

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Inspektorat I
Lampiran : 3 (tiga) Berkas
Tanggal : 19 Januari 2024

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tanggal 29 November Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2023 Unit Inspektorat I.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur I,

Bayu Fajar Nugroho

Tembusan:
Inspektur Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT I
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 19 Januari 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2023.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I dengan baik, serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, 10 Januari 2024

Inspektur I, 

Bayu Fajar Nugroho

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2023.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I dengan baik, serta semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2024
Inspektur I,

Bayu Fajar Nugroho

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	5
DAFTAR BAGAN	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	10
B. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT I	10
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
BAB II	15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. RENCANA KINERJA	19
C. RENCANA ANGGARAN	21
D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	31
1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	31
2. Analisis Capaian Sasaran Kinerja	31
3. Capaian Rencana Aksi 2023	42
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	46
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	49
B. PERMASALAHAN/ KENDALA	55
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	57

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. PETA SDM INSPEKTORAT I	13
BAGAN 2. Matrik Indikator Tujuan.....	16
BAGAN 3. PETA STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL	16
BAGAN 4. Matrik Renstra Inspektorat I.....	17
BAGAN 5. PERAN APIP.....	20
BAGAN 6. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023	22
BAGAN 7. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023 (Revisi 12).....	22
BAGAN 8. Perspektif Perjanjian Kinerja	23
BAGAN 9. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2023.....	24
BAGAN 10. Rencana Aksi Tahun 2023.....	19
BAGAN 11. Rencana Aksi	28
BAGAN 12. Realisasi Indikator Tujuan.....	32
BAGAN 13. Perbandingan Level MRI	32
BAGAN 14. Realisasi Sasaran Strategis.....	40
BAGAN 15. Realisasi Sasaran Strategis.....	41
BAGAN 16. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan.....	42
BAGAN 17. Capaian Output Kinerja 2023	46
BAGAN 18. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39.....	47
BAGAN 19. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 sesuai Aplikasi PP39.....	47
BAGAN 20. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2023	48
BAGAN 21. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	49
BAGAN 23. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi urusan keuangan dan barang milik negara kementerian, pengelolaan dan pengendalian risiko, serta pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat I menetapkan visi sesuai Rencana Strategis Tahun 2023-2024 yaitu mendukung Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan tugas pembinaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan dan BMN untuk menghasilkan Pengelola Keuangan dan BMN yang berintegritas, andal, dan professional dengan misi meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas layanan perbendaharaan yang transparan, dan meningkatkan kualitas layanan pelaporan keuangan dan BMN yang akuntabel. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 serta kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I.

Kinerja Inspektorat I tahun 2023 antara lain :

a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp. 2.100.000.000,-
Realisasi	: Rp 2.099.943.413,-
Persentase	: 99,997%
Sisa Anggaran	: Rp 56.587-

- b. Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal, diperoleh melalui kegiatan pengolahan *Data dan Informasi terkait temuan material berdasarkan pengawasan eksternal*. Cara pengukuran Indikator ini dengan *Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian khususnya cakupan tugas Inspektorat I yaitu BPSDMI dan Sekretariat Jenderal*. Realisasi batas toleransi material di tahun 2023 pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I adalah sebesar 0,00850%;
- c. Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti. Kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Pelayanan, Bantuan dan Konsultasi Hukum. Target yang ditetapkan sebesar 90%. Cara pengukuran Indikator ini adalah Persentase Jumlah aduan

yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas. Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari-Desember 2023, Jumlah Pengaduan yang berkadar pengawasan sebanyak 2 kali pengaduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Selama Tahun 2023, telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat sejumlah 628 aduan;

- d. Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi. Target yang ditetapkan sebesar 92%. Cara pengukuran Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi. Data rekomendasi yang digunakan adalah rekomendasi hasil pengawasan tahun sebelumnya (T-1). Realisasi Indikator ini yang dihitung selama tahun 2023 mencapai 98,97%;
- e. Indikator Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) dengan target yang ditetapkan sebesar level 3 yang kemudian dikonversi menjadi nilai 2,89. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemetaan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian. Cara pengukuran indikator ini adalah Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan dengan hasil 3,445;
- f. Indikator Tingkat kepuasan pelanggan cakupan tugas Inspektorat I dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Cara pengukuran indikator ini adalah Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 65 responden (auditi), diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan Inspektorat I sebesar 84,27% dengan kategori kinerja unit pelayanan Sangat Baik dan mutu pelayanan B;
- g. Indikator Penerapan TABK (Teknik Audit Berbantuan Komputer) dengan target yang ditetapkan sebesar 79%. Cara pengukuran indikator ini adalah 'Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan indicator
 - Pada Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling
 - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor
 - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)

- Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan
- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office

Hasil pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan asumsi pelaksanaan pengawasan telah menggunakan aplikasi tersebut.

- h. Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal dengan target yang ditetapkan sebesar 80%. Kegiatan penunjang indikator ini adalah pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja dan Pemanfaatan barang/jasa di dasarnya pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah. Realisasi yang diperoleh selama tahun 2023 sebesar 99,997% melebihi target yang ditetapkan;
- i. Indikator Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT yang ditetapkan sebesar 100% dengan Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT, dengan hasil 100%.;
- j. Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya yang ditetapkan sebesar 100% dengan cara penghitungan Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki, dengan hasil 100%;

Dengan disusunnya LAKIP Inspektorat I tahun 2023 ini, diharapkan dapat disajikan langkah dan upaya Inspektorat I dalam mencapai sasaran kinerja tahun 2023, yang merupakan target jangka menengah pelaksanaan Renstra Inspektorat I tahun 2020-2024 dan dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta menjadi masukan dan umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat I dalam menunjang peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal dan Kementerian Perindustrian dalam mengawal pembangunan sektor industri di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

B. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT I

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, peran strategis pengawasan internal cakupan Inspektorat I dalam rangka pembangunan industri adalah

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian dan Isu Strategis Pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas; dan
5. Menerapkan audit berbasis risiko.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat, Unit Vertikal, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit Satker Pusat dan Vertikal yang menjadi cakupan tugas, serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015.

Pada tahun 2023 Inspektorat I juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat I agar penerapan kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai peraturan berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat I melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) yaitu **Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terselenggara dengan optimal, Inspektorat I melakukan **Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi**, berupa pengawalan/pendampingan dan pengawasan kinerja serta pendampingan implementasi manajemen risiko.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan**.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. KELEMBAGAAN

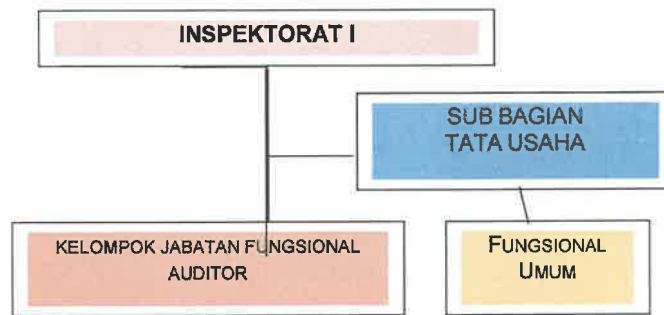
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Inspektur
- Subbagian Tata Usaha
- Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang berkompeten yang ditunjuk oleh Inspektur.

Struktur Organisasi Inspektorat I



2. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2023 sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat structural 2 orang, auditor sebanyak 15 orang, fungsional umum 1 orang, dan 1 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPM). Berdasarkan analisis beban kerja dan penghitungan gugus tugas, jumlah auditor tersebut belum memadai karena belum memenuhi jumlah ideal sebagaimana tergambar dalam table berikut:

Bagan 1. Peta SDM Inspektorat I

No.	Jumlah SDM APIP	Kondisi saat ini	Jumlah Ideal Sesuai Kebutuhan
1)	SDM Pengawasan		
a.	Jabatan Struktural	2	2
b.	Jabatan Fungsional Auditor	15	36
c.	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-
d.	Pegawai Pelaksana Pengawasan bukan Auditor	1	1
2)	SDM Penunjang (ketatausahaan)		
a.	Jabatan Fungsional tertentu	-	2
b.	Jabatan Fungsional Umum	1	3
Jumlah		19	44

3. Cakupan Tugas

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2019, Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit terdiri dari 2 satker Pusat dan 26 satker vertikal meliputi:

- a. Unit Pusat (2 satker) yaitu:
 - 1) Sekretariat Jenderal;
 - 2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
- b. Unit Vertikal Politeknik (13satker), SMK (9 satker) dan BDI (7 satker), yaitu:
 - 1) Politeknik STMI Jakarta;
 - 2) Politeknik STTT Bandung;
 - 3) Politeknik AKA Bogor;
 - 4) Politeknik PTKI Medan;
 - 5) Politeknik ATI Padang;
 - 6) Politeknik ATK Yogyakarta;

- 7) Politeknik APP Jakarta;
- 8) Politeknik ATI Makassar;
- 9) Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- 10) Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta;
- 11) Politeknik Industri Logam Morowali;
- 12) Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal;
- 13) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
- 14) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Bogor;
- 15) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Padang;
- 16) Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar;
- 17) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh;
- 18) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Makassar;
- 19) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Yogyakarta;
- 20) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Bandar Lampung;
- 21) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Padang;
- 22) Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Pontianak;
- 23) Balai Diklat Industri Medan;
- 24) Balai Diklat Industri Padang;
- 25) Balai Diklat Industri Jakarta;
- 26) Balai Diklat Industri Yogyakarta;
- 27) Balai Diklat Industri Surabaya;
- 28) Balai Diklat Industri Makassar;
- 29) Balai Diklat Industri Denpasar.

4. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang sedang dihadapi Inspektorat I

Inspektorat I diharapkan dapat memberikan pengawasan yang optimal terhadap pembangunan infrastruktur CORPU dan pengawasan terhadap akuntabilitas pembangunan sarana dan prasarana yang sedang dilaksanakan oleh BPSDMI dan sekretariat Jenderal. Inspektorat I diharapkan mampu memberikan pandangan dan rekomendasi kepada pimpinan untuk dapat memberikan keputusan yang sebaik-baiknya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian, dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut apabila diterjemahkan dalam sektor industri adalah mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelol sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berkewajiban untuk dapat mengawal tercapainya visi Presiden dan Wakil Presiden di sektor industri secara efektif, efisien serta akuntabel melalui aktivitas *quality assurance*, *consulting partner*, serta anti *corruption activity*.

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu “Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional” yang bercirikan:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat I adalah sebagai berikut :

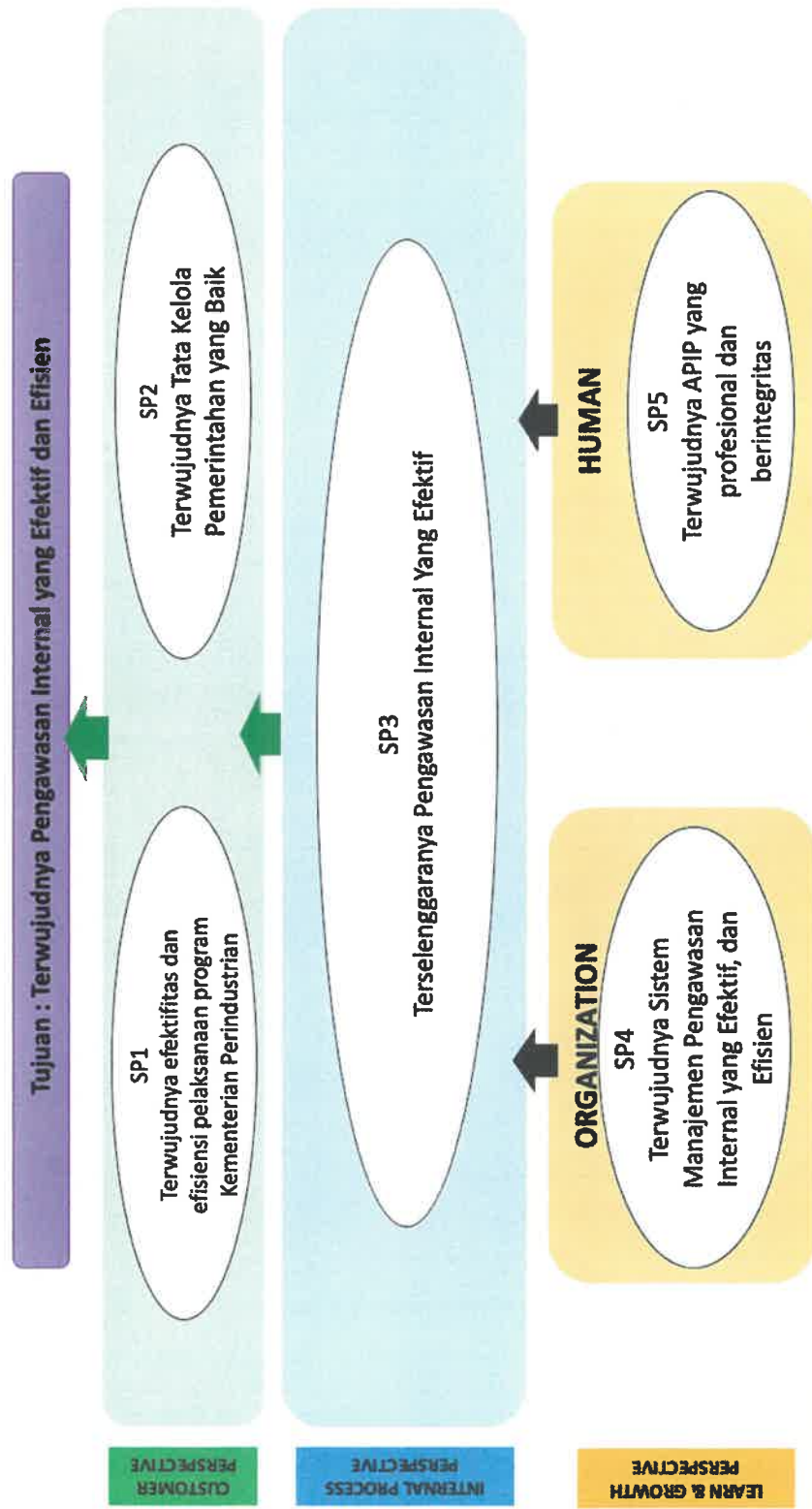
Bagan 2. Matrik Indikator Tujuan

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Mendukung tercapainya tata kelola pemerintah yang baik	Tj.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (perubahan)	Level	3	3	-	-	-
						Indeks	-	2,85	2,89	2,92	3

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. yang merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

1. Batas toleransi temuan eksternal sebesar 1% pada tahun 2024;
2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (IKU) sebesar 2% pada tahun 2024;
3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% pada tahun 2024;
4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker (IKU) sebesar 93% pada tahun 2024;
5. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Index berada pada level 4 di tahun 2024;
6. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan sebesar 85% pada tahun 2024;
7. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) sebesar 85% pada tahun 2024;
8. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT sebesar 100% pada tahun 2024;
9. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya sebesar 100% pada tahun 2024.

Adapun peta strategi Inspektorat Jenderal dilihat dari perspektif pemangku kepentingan, proses internal serta pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3. Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan peta strategis pengawasan yang dilakukan Inspektorat I dapat dijabarkan sebagai berikut

Bagan 4. Matrik Renstra Inspektorat I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2023	Target 2023	Target 2024	Cara Pengukuran
Stakeholders Perspective									
1	Terwujudnya efektivitas dan pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1 Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,50%	1,40%	1,30%	1,20%	1,00%	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai temuan dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021
		2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	Jumlah aduan yang telah masuk ke sistem Dumas berkadar pengawasan dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	91%	91,5%	92% (86,52%)	92,00%	92,20%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2021, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2020
		2 Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level Indeks	Level 3 -	Level 3 -	Level 3 (2,85)	- 2,89	- 2,92	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan,dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan

Internal Process Perspective										
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasa Pelanggan Inspektoral Jenderal	Persen	Belum ada	70%	80%	80%	85%	<p>Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPi. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarluaskan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektoral disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017</p>
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	76%	77%	78%	79%	80%	<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel, SQL, Access, dll)*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll)- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office</p>

4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	Belum ada	75%	80%	85%	90%	<p>R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Inspektorat Jenderal</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN.</p> <p>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p> <p>Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.</p>
Learn & Growth Perspective										
		1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	Menghitung persentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan	Persen	80%	90%	100%	100%	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi Jf-A terakhir yang dimiliki

B. RENCANA KINERJA

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian Tahun 2023 adalah: **“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”**

2. SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Internal 2023 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

- a. Pengawasan P3DN;
- b. Pengawasan kinerja dan kegiatan beresiko tinggi;
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan sektor industri;
- d. Konsultasi implementasi manajemen resiko; dan
- e. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Perindustrian yang efektif, efisien, ekonomis dan taat peraturan, maka kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*Assurance*) maupun pemberian jasa konsultasi (*Consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang termasuk ke dalam pengawasan preventif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori)
 - 1) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 3) Pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
 - 4) Monitoring Penyerapan Anggaran.
- b. Kegiatan Pengawasan Non Mandatori
 - 1) Pengawasan Prioritas;
 - 2) Consulting Manajemen Risiko;
 - 3) Kajian Isu Aktual;
 - 4) Pendampingan Pemeriksaan Eksternal.

2. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran melalui penjaminan mutu (Assurance).

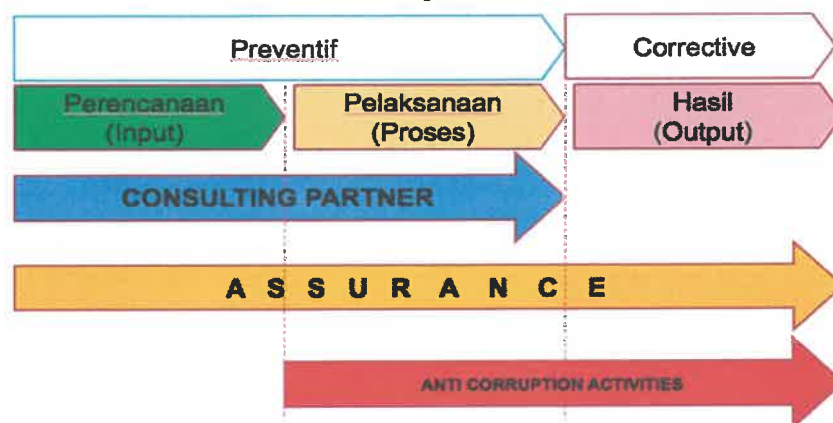
Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2021 yang termasuk ke dalam pengawasan detektif ini adalah:

- a. Kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori):
 - 1) Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan (Zona Integritas, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
 - 2) Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI);
 - 3) Pengawasan Kegiatan Konkuren;
- b. Kegiatan Pengawasan Non Madatori
 - 1) Audit Kinerja maupun Audit Khusus;
 - 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan bidang perindustrian;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP).

Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian akan dilakukan sejak tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, maupun tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan baik yang bersifat preventif maupun detektif.

Pelaksanaan pengawasan internal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (Assurance) maupun mitra konsultasi (Consulting Partner). Sedangkan pada tahap pelaporan/paska pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (Assurance).

Bagan 5. Peran APIP



Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan internal yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Tema pengawasan (Audit)
 - a) Audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten;
 - b) Audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
2. Mandatori
 - a) Audit kinerja
 - b) Reviu LK/BMN dan PIPK
 - c) Reviu RKA dan RK BMN
 - d) Penilaian SAKIP
3. Pengawasan
 - a) Pengawasan Manajemen Resiko
 - b) Pengawasan Program Prioritas

C. RENCANA ANGGARAN

Sesuai dengan DIPA tahun 2023, program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah "Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian".

Masing-masing Unit Kerja Eselon II mempunyai 1 (satu) kegiatan. Adapun kegiatan Inspektorat I adalah "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I" dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp. 2.100.000.000,- dan pagu akhir Rp. 2.100.000.000,-

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
WA	Program Dukungan Manajemen	2.100.000.000
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.100.000.000
1841.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.100.000.000
952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	22.748.000
51	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	22.748.000
A	Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	22.748.000
953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	43.404.000
51	Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas Inspektorat I	43.404.000
A	Penyusunan Evaluasi Triwulanan Dan Tahunan	43.404.000
965	Layanan Audit Internal	2.033.848.000
51	Audit Program Dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	1.190.370.000
A	Pelaksanaan Audit Kinerja	1.190.370.000
52	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	258.448.000
A	Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	145.200.000

C	Pelaksanaan Reviu Rkaki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	85.660.000
D	Pelaksanaan Reviu Rkbnm Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	24.588.000
53	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.600.000
A	Pelaksanaan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.600.000
54	Konsulting Dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	508.430.000
A	Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	241.246.000
B	Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	264.684.000
C	Sosialisasi/pendampingan Implementasi Spip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	2.500.000
TOTAL		2.100.000.000

Bagan 6. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023

Bagan 7. Revisi Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2023 (revisi 12)

Jenis Kegiatan		Pagu Anggaran	OUTPUT	SATUAN
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.190.370.000	26	Laporan
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	258.448.000	85	Laporan
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.600.000	28	Laporan
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	508.430.000	4	Laporan
5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	22.748.000	1	Laporan
6	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	43.404.000	5	Laporan
Total		2.100.000.000	161	Laporan

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2023 Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,-. Pada akhir triwulan IV sebagai berikut:

1. Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp 1.190.370.000,-.
2. Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp. 258.448.000,-.
3. Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp.76.600.000,-.
4. Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp 508.430.000,-.
5. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I sebesar Rp. 22.748.000,-.
6. Evaluasi Kegiatan Inspektorat I sebesar Rp. 43.404.000,-.

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2023 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 sesuai dengan Renstra Inspektorat I:

Bagan 8. Perspektif Perjanjian Kinerja

Perubahan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 1 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis	Perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 16 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 15 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2023, Inspektorat I membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat I ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal*) IKU (target tetap)	Persen	1,20%
		2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	Persen	90%
		3	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	Persen	92%
		4	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level	-
Indeks	2,89				
Internal Process Perspective					
2	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	80%
		2	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Persen	79%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	3	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	85%
Learn & Growth Perspective					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	Persen	100%
		2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	Persen	100%

Bagan 9. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2023

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui rencana aksi sebagai berikut:

Bagan 10. Rencana Aksi Tahun 2023

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	1 Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	2,89	Level	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.100.000.000	-	-	-	-
SK.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	1,20%	Persen	Pelaksanaan Audit Kinerja Reviu LK/BMN Reviu PIPK Reviu RK-BMN Revu RKA-K/L Pendampingan Manajemen Resiko Evaluasi SAKIP Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Tahun Berjalan	1.190.370.000 145.200.000 3.000.000 24.588.000 85.660.000 2.500.000 76.600.000 264.684.000 241.246.000	25%	25%	25%	25%

SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	2,89	Level	-	-	-	-	-	-
2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat I	95%	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	92%	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK.3	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I	80%	Persen	-					-
		2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	79%	Persen						
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	85%	Persen						-

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KEGIATAN UTAMA	PAGU	TW I	TW II	TW III	TW IV
SK.5	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	100%	Persen	Rancangan Program Kerja	22.748.000	25%	25%	25%	25%
		2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Persen	Evaluasi dan Pelaporan	43.404.000	25%	25%	25%	25%

Rencana Aksi Inspektoral Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal *) IKU	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	1.2%	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	- Kegiatan Audit, Monev SAKIP, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja oleh pimpinan, Reviu LK-BMN, Pelaksanaan pendampingan/ pengawalan kegiatan berisiko tinggi	Ir I, II, III, IV, Set Ijtjen	Koordinator Arsiparis (Koordinasi TL dan EHP)

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Tata Laksana di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	95%	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian - Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan 	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Arsiparis

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut 	92%	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut - Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran Data Tindak Lanjut - Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal 	Ir I, II, III, IV, Set Ijten	Koordinator Arsiparis (Koordinator TL dan EHP)
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin 	2.89	-	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin dan sosialisasi penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan tingkat maturitas SPIP Kemenperin dan Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Kegiatan Penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian 	Ir I, II, III, IV, Set Ijten	Koordinator Program dan Keuangan

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAUPI.	80%	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang disusun berdasarkan AAUPI. Disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang disusun berdasarkan AAUPI. Disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang disusun berdasarkan AAUPI. Disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan	- Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan yang disusun berdasarkan AAUPI. Disebarkan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan	Ir. I, II, III, IV	Kasubag TU tiap Inspektorat

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023							
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit, Tahap Perencanaan, Tahap Pengumpulan data, Penelaahan analisis, Penyusunan kertas kerja, Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data dan tahap pelaporan	79%	- Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji - Tahap Penetapan data yang akan diuji - Tahap menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) - Penelaahan analisis (Excel,SQL, Access, dll) - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MStream, Gdrive, dll) - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan	Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) - Penelaahan analisis (Excel,SQL, Access, dll) - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MStream, Gdrive, dll) - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan	Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshoot penggunaan aplikasi) - Penelaahan analisis (Excel,SQL, Access, dll) - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MStream, Gdrive, dll) - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan
					Triwulan IV		
							Triwulan I, II, III, IV
							Koordinator

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal*)IKU	- Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Inspektorat Jenderal	85%	- Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	- Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	- Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	- Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Kepala Bagian Umum
	Terwujudnya Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	- Koordinasi Program Pengawasan Jakwas -Penyusunan RKA-Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian -Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	100%	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian --Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan -Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian --Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian --Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan	- Koordinasi Program Pengawasan -Penyusunan Jakwas -Penyusunan RKA-KL Inspektorat Jenderal -Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal --Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian --Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan --Reviu RKA-KL	Ir I, II, III, IV, Set Itjen	Koordinator Program dan Evaluasi

Rencana Aksi Inspektorat I Tahun 2023										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Target Total	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Penanggung Jawab	Koordinator
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	100%	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal	Ir I, II, III, IV, Set I/tjen	Koordinator Kepegawaian

Bagan 11. Rencana Aksi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2023. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat I. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat I dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu:

1. **Indikator Masukan (*Input*)**: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)**: sesuatu bentuk produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)**: sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)**: sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)**: ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Untuk tingkat eselon II, indikator kerja yang dihasilkan dicapai sampai indikator keluaran (*Output*) yang mengacu pada eselon I yaitu capaian indikator hasil (*Outcome*).

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Inspektorat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Inspektorst I Jenderal menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian. Adapun rincian analisis

capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat I untuk mewujudkan tata kelola keuangan Kementerian Perindustrian yang baik dan benar, maka dilakukan kegiatan pengawasan internal pada cakupan tugas Inspektorat I yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Adapun sasaran strategis yang telah dicapai oleh Inspektorat I adalah sebagai berikut:

Kode Tujuan	Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2023	
					Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tj.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Tj.1	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level	3	-
				Indeks	2,89	3,445

Bagan 12. Realisasi Indikator Tujuan

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Dalam penilaian terhadap manajemen resiko tahun 2023 masih merupakan tahap ujicoba pedoman baru bekerjasama dengan BPKP sehingga masih terdapat indikator-indikator penilaian yang masih perlu didiskusikan sehingga memperoleh hasil maksimal yang sebenarnya.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2023-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023, pada tanggal 27 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan indikator kinerja tujuan 1.2 "Indeks Penerapan Manajemen Risiko" atau lebih dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen RPJMN. Perbandingannya pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

Tahun	K/L		
	Pertanian	Perindustrian	Pertanian
2018	3.037	Level 3	3.462
2019	3.112	3.477	3.507
2022	Belum Ada Data	2,77	Belum Ada Data
2023	Belum Ada Data	2,85	Belum Ada Data

Bagan 13. Perbandingan Level MRI

Data diatas menunjukkan bahwa Kementerian Perindustrian menurut pedoman penilaian yang baru belum dapat mencapai level 3, namun hal ini dapat disebabkan karena perbedaan bobot nilai terhadap unsur-unsur penilaian sehingga mengakibatkan perbedaan nilai dengan metode sebelumnya.

2. Analisis Capaian Sasaran Kinerja

a) Indikator Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN s/d				
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Tenwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	1,2%				1841	Audit Kinerja	1.190.370.000	73,45%	92,55%	95,70%	100%
		1. Pelaksanaan Kinerja							43,99%	47,44%	100%	100%
		2. Reviu LK/ BMN							100%	100%	100%	100%
		3. Reviu PIPL							-	8%	66,73%	100%
		4. Reviu RKA-K/L							33,53%	62,86	95,80%	100%
		5. Pendampingan							-	-	100%	100%
		6. Manjemen Resiko							-	-	100%	100%
		7. Evaluasi SAKIP							-	-	92,17%	100%

$x \leq 1,2\%$ $x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa} \times 100\%$ dimana	x : batas maksimum	IKU	Target	Realisasi
	Δmt : Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan cakupan Inspektorat I yang bernilai uang total realisasi anggaran satuan kerja cakupan tugas inspektorat I			

maka, batas toleransi temuan= temuan BPK /realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2022 jadi, batas toleransi temuan material: **0,0869%** telah mencapai target.

Realisasi Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I adalah 1.110.294.918.900,-

Temuan Material Cakupan Tugas Inspektorat I adalah 964.547.921,86

Sehingga

$$x \leq 1,2\%$$

dimana

$$x = \frac{964.547.921,86}{1.110.294.918.900} \times 100\% = 0,0869\%$$

Satuan Kerja	Realisasi Belanja	Temuan BPK
BPSDMI	927.120.658.900,-	856.246.792,73
Sekretariat Jenderal	183.174.260.000,-	60.316.001,13
Total	1.110.294.918.900,-	964.547.921,86

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
		0,094%	0,003%	0,003%	0,003%

b) Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN											
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti				90%						100%

Sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pengaduan yang berkadar pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat I

IK	TARGET	REALISASI
	90%	100%

Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas

Periode 1 Januari s/d 30 April 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 108 (Seratus delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang terdiri dari 106 (seratus enam) kali merupakan pengaduan tidak berkadar pengawasan dan 2 (dua) kali berkadar pengawasan terkait masalah kepegawaian. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

Periode 1 Mei s/d 30 Agustus 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersfat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan, telah seluruhnya selesai ditindaklanjuti;

Periode 1 September s/d 31 Desember 2023, Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersfat tidak berkadar pengawasan. Dari seluruh aduan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

Dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023, realisasi Indikator Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100% karena seluruh pengaduan berkadar pengawasan telah selesai ditindaklanjuti. Capaian Indikator ini sebesar 111,11%. Keberhasilan indikator pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dapat memenuhi target dikarenakan jumlah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang masuk hanya sedikit dan langsung ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Hal itu berarti kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal sudah baik.

Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun

dimana $x \geq 90\%$ ΔAT $x = \Delta AM$	dimana $x \geq 90\%$ ΔAT $x = \Delta AM$	x :	batas maksimum
		ΔAT :	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi
		ΔAM :	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2021

Pengawasan		Non Pengawasan
BPSDMI :	2	48
SETJEN :	-	52
	2	104

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
	100%	100%	100%	100%	100%

c) Capaian Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN												
Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU				92%	-	-	-	-	-	-	92%

Kegiatan ini berkoordinasi dengan bagian Tindak Lanjut, Sekretariat Inspektorat Jenderal. Indikator kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2023. Penyelesaian kegiatan ini agak berbeda dari tahun sebelumnya, disini masing-masing satker harus menyelesaikan tindak lanjutnya dilihat dari segi program, jadi tidak hanya membuat surat teguran atau pernyataan saja. Hal ini perlu waktu dan penyesuaian dari satker untuk penyelesaian saran/rekomendasi hasil pengawasan tersebut. Realisasi indikator ini sebesar 72% dari total satker cakupan tugas Inspektorat I, sehingga belum dapat mencapai target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pencapaian ini dilakukan dari batas waktu yang diberikan oleh masing-masing satker cakupan tugas untuk menyelesaikan tindak lanjut saran/rekomendasi, namun masih terdapat satker yang belum dapat menyelesaikan. Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja	IKU	TARGET	REALISASI

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) dibagi dengan jumlah total rekomendasi

x	:	batas maksimum
$\Delta RAHP$:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi
ΔRHP	:	total rekomendasi hasil pengawasan

$x \geq 92\%$
dimana
 $x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP} \times 100\%$

$x \geq 92\%$
dimana
 $x = \frac{468}{474} \times 100\%$
 $= 98,73\%$

REKOMENDASI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT I TAHUN 2023				
SR	BSR	B	TPTD	
BPSDMI	: 396	13	6	0
SETJEN	: 48	11	-	-
	474	444	24	6

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
	88%	93%	88%	71%	98,73%

e) Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL											
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat I				80%						80%

Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIP1. Pada tahun 2023, kuesioner akan disebarluaskan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai

yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui e-survey didapat dari

Hasil	
Nilai SKM	0,667
Konversi dalam persen	84,27
Kesimpulan	Sangat Baik

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
	Belum ada indikator		100%	90%	97,2%

f) Capaian Indikator Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL											
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)				79%		-				79%
<p>Pada tahun 2019, Inspektorat Jenderal membuat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan (SINGA) untuk memonitor hasil pengawasan yang dapat digunakan oleh seluruh satker. Dalam pembuatan aplikasi ini bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian. Aplikasi ini telah disosialisasikan ke semua satker oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan lebih memudahkan kegiatan pengawasan, baik oleh auditor maupun auditi. Pemanfaatan aplikasi ini pada satker cakupan tugas Inspektorat I, masih pada proses awal, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal.</p>											
<p>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</p>											
<p>Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja</p>											
<p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll)*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan-Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam, Gdrive, dll)- lkhfisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data- Tahap Pelaporan menggunakan Office</p>											
Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020				2021	2022				2023
	Belum ada indikator	100%				91%	100%				100%

g) Capaian Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan PKPT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT				80%	Anggaran Kerja Inspektorat I	Rp. 16.220.000,-	24,95%	24,95%	25,18%	24,92%

Capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Indikator kinerja ini muncul sejak tahun 2018, jadwal audit dan revaluasi dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan kategori sangat baik

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

dimana

$$x \geq 70\%$$

$$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$$

dimana

$$x \geq 80\%$$

$$x = \frac{86}{96} \times 100\% = 100\%$$

x	:	batas maksimum
ΔRSP	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
ΔRP	:	Jumlah rencana Pengawasan

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
	Belum ada indikator	82,14%	100%	100%	100%

h) Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				1841	RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4				TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN												
Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I				80%	prosedur	-		100%	100%	100%	100%

Capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 100%. Indikator kinerja ini muncul sejak tahun 2018, sedangkan tahun 2017 belum dilakukan analisa pencapaian terhadap indikator ini. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan, jadwal audit dan reviu sesuai dengan jadwal pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dengan kategori sangat baik

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 522119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.

dimana	$x \geq 80\%$	x	:	batas maksimum
	$x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP} \times 100\%$	ΔRSP	:	Rp. 2.100.000.000,-
	$= 100\%$	ΔRP	:	Rp. 2.099.863,13,-

Capaian 5 tahun terakhir	2019	2020	2021	2022	2023
Belum ada indikator	Belum ada indikator	Belum ada indikator	100%	100%	100%

i) Capaian Indikator Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				RESIKO UTAMA	ANGGARAN	REALISASI KEGIATAN			
		TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN											
Terwujudnya Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian penugasan SDM yang sesuai dengan perannya				90%	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	Rp. 16.300.000,-	28,25%	28,25%	28,25%	15,25%

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	TARGET	REALISASI
		90%	100%

Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari).

Indikator ini dibuat untuk mengurangi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh satuan kerja/auditi sekaligus mendorong auditor untuk memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dan memberikan efek nyata bagi perbaikan kinerja satuan kerja

Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA

<p>$x \geq 80\%$ dimana ΔJFA $x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP}$</p>	<p>$x \geq 90\%$ dimana 96 $x = \frac{96}{96}$ $= 100\%$</p>	<p>x : batas maksimum ΔJFA : 96 ΔJP : 96</p>	<p>x : batas maksimum ΔJFA : 96 ΔJP : 96</p>	<p>x : batas maksimum ΔJFA : Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat ΔJP : Jumlah Penugasan pengawasan</p>	2019	2020	2021	2022	2023
					Belum ada indikator	Belum ada indikator	100%	100%	100%

Berdasarkan matrik diatas dapat diringkas capaian Inspektorat I dapat diringkas sebagai berikut

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satter cakupan tugas Inspektorat I	IKU IK IKU	1,2% 90% 92%	0,0869% 100% 98.73%	Tercapai 100% Tercapai 100% Tercapai
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,89	3,445	Tercapai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	IK IK IKU	80% 79% 85%	100% 100% 100%	Tercapai 100% Tercapai 100% Tercapai 100%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK IK	100% 100%	89,56% 100%	tercapai 100% Tercapai 100%

Bagan 14. Realisasi Sasaran Strategis

Ringkasan Pencapaian Indikator Kinerja sampai dengan Tahun Berjalan dan Target Jangka Menengah:

Bagian 15. Realisasi Sasaran Strategis

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2023		Target 2024	
			2021	2022	Target	Realisasi		Capaian
1	2	3	4	5	4	6	7	8
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	0,089%	0,089%	<1,2%	0,0869%	100%	<1,2%
			100%	100%	90%	100%	100%	100%
			71%	71%	92%	98,73%	100%	94%
			Level 3	2.85	2.89	3.445	100%	indeks
2.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	100%	100%	85%	100%	100%	85%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I	75%	75%	90%	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	92%	92%	90%	100%	100%	100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	92%	92%	90%	100%	100%	100%

3. Capaian Rencana Aksi 2023

Bagan 16. Capaian Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
1.	Meningkatnya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan	<p>(2) Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I</p> <p>Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I</p> <p>Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti</p>	<p>(3) 1,4%</p>	<p>(4) Belum dapat diukur</p>	<p>(5) Reviu buka blokir tingkat eselon I: BPSDMI dan Sekjen</p>	<p>(6) Belum dapat diukur</p>	<p>(7) Reviu L/K dan BMN Semester I, pelaksanaan Triwulan III</p>	<p>(8) 100%</p>	<p>(9) Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,089%</p>	<p>(10) 100%</p>	<p>(11) Seluruh laporan Kementerian Perindustrian dan telah diperoleh informasi terkait hasil pemeriksaan adalah 0,089%</p>
			8%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	80%	Tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan, pelaksanaan berkoordinasi dengan Set. Ijen,	85%	Pelaksanaan berkoordinasi dengan Bagian TL Set Ijen dengan sampling sebanyak 6 Satker
			85%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	Belum dapat diukur	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi	100%	Pelaksanaan oleh Klinik Konsultasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)JKU	91,5%	Belum dapat diukur	-	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	60%	Consulting dan Pengawasan	7 Rekomendasi	Laporan hasil Monev yang berisi rekomendasi telah disusun
		Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti*)JKU	80%	80%	Belum dapat diukur	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah kan oleh satuan kerja telah disampaikan.	100%	Reviu RKAKL Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 September 2019, seluruh perbaikan telah disampaikan oleh satker.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan				
2.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80%	(4) 14%	(5) Reviu buka blokir BPSDMI (Pusat) dan Audit 19 Satker	(6) 30%	(7) Pada Triwulan II Audit telah dilakukan pada seluruh Satker: 30 Satker. sedang Reviu dan Monev akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya. Kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.	(8) 90%	(9) Sampai Triwulan III Audit telah dilaksanakan seluruhnya pada 27 Satker, BPSDMI akan dilaksanakan pada triwulan IV. Reviu LK/BM/N pada 28 Satker. Monev sedang dalam proses pelaksanaan.	(10) 100%	(11) Sampai Triwulan IV telah dilakukan Reviu LK/BM/N pada 28 Satker, sebanyak 2 kali seluruhnya telah sesuai dengan PKPT. Audit dilakukan pada 28 Satker. kegiatan ini sesuai dengan jadwal PKPT.				
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan standar pelaksanaan pengawasan Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	85%	Belum dapat diukur	Satker yang diaudit telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 30 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan yang diaudit pada Triwulan I dan II, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan	100%	Dari 28 Satker Binaan hingga Triwulan IV, seluruhnya telah memenuhi standar mutu pengawasan				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan yang Dilakukan										
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
				Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Target	Realisasi Kegiatan			
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Internal yang Efektif dan Efisien	(1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	(3) 50% 50%	(4) Belum dapat diukur	(5) Koordinasi dengan Set. Itjen	(6) Belum dapat diukur	(7) Koordinasi dengan Set. Itjen	(8) 40%	(9) Koordinasi dengan Set. Itjen	(10) 100%	(11) Koordinasi dengan Set. Itjen			

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Inspektorat I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,- namun Sepanjang tahun 2023, realisasi telah mencapai Rp. 2.099.863.13,- atau 99,99%. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,02%.

Apabila dilihat dari pencapaian output kinerja dan anggaran yang telah digunakan selama tahun 2023 adalah:

Bagan 17. Capaian Output Kinerja 2023

KODE	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	KET
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	161 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1. Dokumen rencana kerja dan anggaran Inspektorat I
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	2. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW IV tahun 2022 3. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW I tahun 2023 4. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW II tahun 2023 5. Dokumen evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan TW III tahun 2023 6. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2023
965	Layanan Internal Audit	155 Laporan	7. LHPI pada Satuan kerja BPSDMI 8. LHPI pada Setjen 9. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan/ BMN TA 2022 dan Semester I TA 2023 Satuan kerja BPSDMI (28 Laporan) 10. Laporan PIPK TA 2022 dan Semester I TA 2022 pada cakupan Inspektorat I (6 Laporan) 11. Reviu RKA-KL TA 2024 BPSDMI 12. Reviu RKA-KL TA 2024 Setjen 13. Laporan Evaluasi SAKIP Satuan kerja BPSDMI 14. Laporan Evaluasi SAKIP pada Eselon II BPSDMI dan Setjen 15. Laporan/ Nota Dinas Pengawasan Kegiatan beresiko Tinggi

Bagan 18. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	Triwulan ini		s/d Triwulan ini		Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)
TAK	19,20	119.200.000	5,68	2.099.943.413	-	56.847.

Bagan 19. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023 sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran	Triwulan ini		s/d Triwulan ini		Sisa Anggaran s/d Triwulan IV	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)	Fisik (%)	Keuangan (Rp.-)
1 Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.190.370.000,00	13,00	56.000.000,00	20,06	911.284.159,80	100,00	-
2 Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	258.448.000,00	43,75	-	3,36	148.604.340,00	100,00	-
Pelaksanaan Reviu Pipk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	3.000.000,00	-	-	-	32.120.000,00	100,00	-
Pelaksanaan Reviu Lk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	145.200.000,00	50,00	-	3,53	82.482.840,00	100,00	-
Pelaksanaan Reviu Rkaki Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	85.600.000,00	50,00	-	6,15	34.001.500,00	100,00	-
Pelaksanaan Reviu Rk/bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	24.588.000,00	75,00	-	-	-	-	-
3 Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	76.000.000,00	-	-	-	73.000.000,00	100,00	-
4 Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	508.430.000,00	36,67	63.200.000,00	21,05	379.995.885,80	100,00	-
Pengawasan Program Dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun Berjalan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	241.246.000,00	-	28.000.000,00	2,60	166.075.838,40	100,00	-
Pembinaan Dan Pengawasan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	264.684.000,00	30,00	37.723.348,80	25,08	99.648.806,40	100,00	-
Sosialisasi/pendampingan implementasi Splp Satuan Kerja Cakupan Inspektorat I	2.500.000,00	-	-	-	23.382.434,40	100,00	-
5 Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	22.748.000,00	-	-	-	16.219.150,00	100,00	-
6 Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	43.404.000,00	-	-	-	13.759.200,00	100,00	-
Total	2.100.000.000,00	38,68	119.200.000,00	17,56	1.542.862.736,00	100,00	56.847.000,00

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian sepanjang Tahun 2023 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan, dapat dilihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya terdapat efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 0,1% dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Bagan 20. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2023

No	Programi/Kegiatan	Pagu				Realisasi Total			Efisiensi Anggaran 2023 (%)
		2022		2023		Perbedaan	2023	Perbedaan	
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.083.022.000	1.190.370.000	107.348.000	967.826.771	1.190.317.930	0,1	99,996	5
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	267.570.000	258.448.000	-9.122.000	266.892.500	258.448.000	0,1	100,00	5
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	173.000.000	76.600.000	-96.400.000	172.829.000	76.600.000	0,1	100,00	5
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	635.161.000	508.430.000	126.731.000	534.402.199	508.425.483	0,1	99,999	5
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	22.700.000	22.748.000	48.000	16.220.000	22.748.000	0,1	100,00	5
6.	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	27.300.000	43.404.000	16.104.000	24.672.000	43.404.000	0,1	100,00	5
	Total	2.208.753.000	2.100.000.000	-108.753.000	1.982.842.470	2.099.943.413	1	99,997	30

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat I tahun 2023 secara umum dapat dikemukakan:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I tahun 2023 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
- b. Pencapaian kinerja telah memenuhi target antara lain:

Bagan 21. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,2%	0,0869%	Tercapai 100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	90%	100%	Tercapai 100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	92%	98.73%	Tercapai
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	2,89	3,445	Tercapai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	80%	100%	Tercapai 100%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	79%	100%	Tercapai 100%
		Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Insepektorat I	IKU	85%	100%	Tercapai 100%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	100%	89,56%	tercapai 100%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	100%	100%	Tercapai 100%

Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat I TA 2023 berdasarkan masing-masing indikator kinerja utama (IKU):

1. Stakeholders Perspective

a) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian;

(1) Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal

Batas toleransi temuan pengawasan eksternal adalah jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tiap-tiap satker cakupan tugas Inspektorat I yang bersifat keuangan dibandingkan dengan total satker. Realisasi indikator kinerja ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi minimize (semakin kecil lebih baik). Kegiatan yang menjadi pendampingan kegiatan berisiko di cakupan tugas Inspektorat I adalah sebagai berikut Pendampingan program kegiatan berisiko tinggi pada pembangunan gedung di Poltek Cilegon, SMAKBO, IMC; dan Pelaksanaan interim Audit pada BPSDMI Pusat.

Pada TW IV Temuan Material Pengawasan Eksternal adalah sebesar 964.547.921,96 atau sebesar 0,0869% dari realisasi belanja satker cakupan tugas Inspektorat I sebesar Rp1.110.294.984.900

(2) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pengaduan Masyarakat terkait satker cakupan tugas Inspektorat I yang telah ditindaklanjuti. Seluruh pengaduan masyarakat yang masuk melalui klinik pengaduan masyarakat dan terkait dengan unit kerja cakupan tugas Inspektorat I telah seluruhnya ditindaklanjuti.

(3) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan

oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator ini antara lain sebagai berikut

Target indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker adalah 95 persen, dengan realisasi sebesar 98,73 persen. Jumlah temuan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 176 temuan, dengan jumlah rekomendasi sebanyak 474 rekomendasi.

Keterangan	Seluruhnya	Telah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
Jumlah temuan	171	167	4
Nilai	111.882.683	111.882.683	-
Jumlah rekomendasi	277	273	4
Sesuai Rekomendasi	269		
Belum sesuai rekomendasi	3		

Bagan 22. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dengan capaian tersebut Inspektorat I telah mendorong dilakukannya perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

b) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(1) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

Evaluasi penerapan manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level) perusahaan, dan sebagai acuan untuk menentukan perencanaan audit dan pendekatan audit yang akan digunakan oleh Auditor Internal. Capaian target indikator ini dihitung pada TW IV.

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. MRI diukur berdasarkan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1,2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP pada Tingkat Kementerian;

Metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko adalah dengan cara menilai 8 (delapan) komponen proses manajemen risiko yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) aspek dan 69 (enam puluh sembilan) kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian akan menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perusahaan yang dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, yaitu Non-existent, Initial, Repeatable, Defined, Managed, dan Optimised.

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kemenperin memperoleh nilai 3,445, yang berarti termasuk dalam kategori definer, yaitu kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pimpinan memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan dan pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

2. Internal Process Perspective

a) Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

(1) Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Indikator ini dihitung berdasarkan survei kepuasan pelanggan kepada para stakeholders Inspektorat I. Berdasarkan survei dengan menggunakan kuesioner, terdapat 17 responden dari pegawai pada unit kerja cakupan tugas Inspektorat I yang memberikan nilai. Rata-rata nilai terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat I Kementerian Perindustrian adalah 3,39 atau sebesar 83,24 persen. Target indikator adalah 80 persen.

(2) Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer

Penggunaan TABK atau CAATs akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu mengkombinasikan pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam proses audit.

Aplikasi yang dipergunakan antara lain aplikasi MS Excel dan aplikasi penganggaran atau evaluasi kinerja pada intranet Kemenperin. Seluruh proses audit dan reviu telah memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, meskipun masih terbatas pada pengumpulan dan validasi data.

Seluruh kegiatan audit pada Inspektorat I telah memanfaatkan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL,

sehingga realisasi indikator sasaran strategis adalah 100 persen dari target sebesar 79 persen.

- b) Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri
 - (1) Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat I

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Capaian ini dihitung untuk belanja diluar belanja pegawai. Secara umum, seluruh belanja telah menggunakan produk dalam negeri, namun nilainya belum dihitung berdasarkan kandungan tiap produk berdasarkan sertifikat TKDN Kemenperin atau realisasi mencapai 100 persen dari target 40 persen. Meskipun demikian pengukuran indikator ini belum dilakukan secara memadai, pengukuran hanya dilakukan pada belanja produk dalam negeri pada belanja (non-pegawai), bukan dihitung untuk tiap produk yang dipakai.

3. Learn & Growth Perspective

- a) Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien.
 - (1) Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/ mengevaluasi kinerja APIP dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Seluruh kegiatan pengawasan telah sesuai dengan PKPT.

(2) Tingkat kesesuaian penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya

Penugasan pengawasan telah sesuai dengan peran tiap-tiap peran dan kompetensi SDM.

B. PERMASALAHAN/ KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat I tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan bersifat *post-audit*, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal.
2. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain dalam penyusunan laporan keuangan 2023 berbasis akrual masih ditemukan kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan penelaahan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan program.
3. Terdapat Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada dasar hukum yang menjadi payung pelaksanaan ataupun anggaran yang memadai, namun menjadi kegiatan prioritas pada tahun berjalan sehingga pada pelaksanaan pengawasan tidak dapat menyajikan indikator-indikator yang mampu memberikan penilaian 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) sehingga hanya dapat memberikan keyakinan terbatas terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategis pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam membantu pencapaian visi dan misi organisasi dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan

di masing-masing unit kerja/obrik dan memberikan *early warning*, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan yang telah rutin dilakukan.

2. Masih perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual. Sosialisasi dan bimtek penelaahan reviu laporan keuangan berbasis akrual yang telah diikuti oleh beberapa pegawai perlu didesiminasikan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.
3. Kebijakan revisi dan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi sedini mungkin dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.
4. Pada setiap pelaksanaan kegiatan dibuat program kerja/ pedoman yang sedemikian rupa untuk memberikan tuntunan dan petunjuk kepada APIP agar diharapkan mampu memberikan penilaian terhadap 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat memberikan nilai tambah terhadap tujuan Kementerian Perindustrian;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan dan hasil evaluasi, diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KODE	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SATUAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	KEGIATAN UTAMA	REALISASI	SATUAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	1 Indeks penerapan manajemen resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	3	Level	*	*	*	3.34		3.34	Nilai	2,100,000,000	2,100,000,000	100.000%
SK.1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektoral I	1.20%	Persen				0.00050%	Peaksanaan Audit Kinerja Revisi LK/BM/IN Revisi PIPK Revisi RK-BMN Revisi RKA-K/L	0.00050%	Persentase	1,190,370,000 145,200,000 3,000,000 24,588,000 85,660,000	1,190,317,930 145,200,000 3,000,000 24,588,000 85,660,000	99.996% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000%
		2 Pengaduan masyarakat terhadap pengawasan diindikasikan pada cakupan tugas Inspektoral I	95%	Persen				100%		100%				
		3 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja cakupan tugas Inspektoral I	92%	Persen				98.97%		98.73%				
SK.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian	2.89	Level				3.34		3.34				
SK.3	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Tingkat kepuasan pelanggan Inspektoral I 2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	80% 79%	Persen Persen				84.27% 100%		84.27% 100.00%				
SK.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektoral I	85%	Persen				99.99%		99.99%				
SK.5	Terselenggaranya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT 2 Tingkat kesesuaian penguasaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100% 100%	Persen Persen				100 100	Rancangan Program Kerja Evaluasi dan Pelaporan	100 100		22,748,000 43,404,000	22,748,000 43,404,000	100% 100%

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN IV
2023

#247885

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN TRIWULAN IV (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

UK. Eselon I : 06 - Inspektoral Jenderal

UK. Eselon II : 01 - Inspektoral I

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN		FISIK			ANGGARAN			Status Kemajuan		PERMASALAHAN		
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Kategori	Keterangan		
1841.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
1	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Selesai	Koordinasi Pemutakhiran Data Sasaran Kinerja Pegawai Inspektoral I	100.00	Dokumen	1	1	22,748,000	22,748,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah	
1841.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
2	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektoral I	Selesai	sudah selesai semua	100.00	Laporan	5	5	43,404,000	43,404,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah	
1841.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
3	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektoral I	Selesai	selesai semua kegiatan audit satuan kerja inspektoral 1	100.00	Laporan	30	30	1,190,370,000	1,190,370,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah	
4	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektoral I	Selesai	Selesai Reviu Satker BPSDMI dan Sekjen	100.00	Laporan	106	106	258,448,000	258,448,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN		FISIK			FISIK Riil		ANGGARAN			PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
5	053 Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	Selesai	telah selesai dikerjakan	100.00	Laporan	38	38	76,600,000	76,600,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6	054 Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	Selesai	sudah selesai pekerjaan di tahun 2023	100.00	Laporan	24	24	508,430,000	508,430,000	100.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1842.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran													
7	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	Telah selesai dan sudah dimanfaatkan	99.99	Dokumen	1	1	15,876,000	15,870,093	99.96%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
1842.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
8	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II	Pelaksanaan	-Telah disusun Laporan PP 39 Tw III - Telah disusun Capaian Output bulan Oktober 2023	99.99	Dokumen	5	5	34,404,000	34,218,370	99.46%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
1842.EBD.965 - Layanan Audit Internal													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil		ANGGARAN			STATUS KEMANFAATAN		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Riil	%	Alokasi	Real	%	Kategori	Keterangan		
9	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	Audit pada Direktorat Jenderal IKMA dilakukan perpanjangan sampai dengan 31 Januari 2024	95.00	Laporan	4	3	5 %	704,321,000	701,987,972	99.67%	Sudah	Laporan Audit Direktorat Jenderal IKMA belum selesai pada bulan Desember disebabkan pada bulan Desember banyak kegiatan Direktorat Jenderal IKMA sehingga untuk klarifikasi temuan audit pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para penanggungjawab kegiatan belum dapat terlaksana, sehingga mempengaruhi realisasi fisik.	Tidak Ada Masalah	Ketelangan	
10	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	Kegiatan ini telah selesai	99.99	Laporan	17	17		97,512,000	97,450,322	99.94%	Sudah	Tidak ada masalah	Tidak Ada Masalah		
11	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	Finalisasi Laporan Money DAK	99.99	Laporan	3	3	5 %	490,745,000	480,414,625	97.89%	Sudah	Tidak ada masalah	Tidak Ada Masalah		
12	054 Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	Kegiatan ini telah selesai	99.99	Laporan	2	2	5 %	619,741,000	618,031,797	99.72%	Sudah	Tidak ada masalah	Tidak Ada Masalah		
13	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	Pelaksanaan	Kegiatan telah selesai	99.99	Laporan	1	2	5 %	37,401,000	37,371,000	99.92%	Sudah	Tidak ada masalah	Tidak Ada Masalah		
1843.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran																

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil			ANGGARAN			STATUS Kemanfaatan		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Real.	Aljabari	Real	%	Aljabari	Real	%	Kategori	Keterangan	
14	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	Penyusunan RKAKL TA 2024 pagu alokasi Inspektorat III Final	90.00	Dokumen	1	1	13 %	13,880,000	1,880,000	13.54%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan			
1843.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi																	
15	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III	Pelaksanaan	Telah disusun laporan PP39 TW III	90.00	Dokumen	5	5	16 %	31,131,000	25,191,800	80.92%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah			
1843.EBD.965 - Layanan Audit Internal																	
16	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	Laporan Audit pada BBSPIJT Bandung	90.00	Laporan	13	11	10 %	646,274,000	493,018,126	76.29%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan			
17	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	Reviu RK BMN dan Reviu RKA KL TA 2023 pada BSKJI, ITJEN, PUSDATIN, dan 24 UPT Daerah di lingkungan BSKJI	95.00	Laporan	57	54	5 %	261,250,000	252,682,575	96.72%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah			
18	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	Pelaksanaan Monev Cakupan Inspektorat III	99.00	Laporan	35	34	5 %	332,079,000	329,226,993	99.14%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah			
19	054 Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	-Pelaksanaan dan persiapan Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	95.00	Laporan	9	8	5 %	686,854,000	438,235,414	63.80%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah			

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil			ANGGARAN			Status Kemanfaatan		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Real.	Real.	4okasi	Real.	Real.	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan	
20	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	Pelaksanaan	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada BSP/PPJ Semarang, dan BSP/II Ambon, dan BSP/II Lampung	85.00	Laporan	1	0	5 %	128,532,000	78,123,753	60.78%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah			
1844.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran																	
21	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	Perencanaan anggaran TA 2024	80.00	Dokumen	1	0		16,910,000	12,400,000	73.33%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada permasalahan			
1844.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi																	
22	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV	Pelaksanaan	Pengumpulan data kinerja TW III TA 2023	75.00	Dokumen	5	7		48,110,000	48,084,960	99.95%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada permasalahan			
1844.EBD.965 - Layanan Audit Internal																	
23	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pelaksanaan	Audit Kinerja pada ditjen KPAIL	70.00	Laporan	30	7		875,975,000	836,267,415	95.47%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan			

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil			ANGGARAN			Status Kemanfaatan		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Alokasi	Real.	%	Kategori	Keterangan		
24	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pelaksanaan	1. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen IKFT 2. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen KPAIL 3. Reviu RKA-KL TA 2024 Ditjen Industri Agro 4. Reviu RKA-KL TA 2024 Pusat P3DN 5. Reviu RKA-KL TA 2024 PPIH 6. Reviu Revisi optimalisasi gaji pada Ditjen KPAIL 7. Reviu Revisi optimalisasi gaji pada Ditjen IA 8. Reviu Revisi optimalisasi gaji pada Pusat P3DN 9. Reviu Revisi optimalisasi gaji pada Ditjen PPIH	70.00	Laporan	30	30	28,357,000	28,357,000	100.00%	28,357,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada permasalahan		
25	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pelaksanaan	Monitoring dan evaluasi program substitusi impor	70.00	Laporan	30	10	107,958,000	44,716,000	41.42%	107,958,000	41.42%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada permasalahan		
26	054 Consulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV	Pelaksanaan	Pengawalan program restrukturisasi permesinan dan peralatan pada Ditjen IKFT dan Ditjen IA	70.00	Laporan	30	1	908,634,000	473,278,344	52.09%	908,634,000	52.09%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan		
27	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV	Pelaksanaan	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal TA 2022	70.00	Laporan	1	1	14,056,000	1,500,000	10.67%	14,056,000	10.67%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada permasalahan		
6036.CAN.001 - Pengadaan Perangkat TIK																	
28	051 Pengadaan Perangkat TIK	Selesai	sudah selesai dilaksanakan	100.00	Unit	1	1	289,400,000	289,400,000	100.00%	289,400,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah		
6036.EBA.957 - Layanan Hukum																	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil			ANGGARAN			Status Kemanfaatan		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Riil	Alokasi	Restil	%	Kategori	Keterangan				
29	051 Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal	Pelaksanaan	masih dalam proses penelaahan relevansi SOP yang telah dibuat dengan kondisi di ljen oleh para Auditor yang telah ditunjuk dalam SK	99.99	Dokumen	2	2		63,406,000	63,167,000	99.62%	Sudah	Cara / Metode Pelaksanaan	metode pelaksanaan belum optimal			
6036.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi																	
30	051 Pelayanan Hubungan Masyarakat	Pelaksanaan	kegiatan ljen pada bulan Desember telah di publikasikan pada akun IG @tjenkemenperin dan website	99.00	Laporan	1	1		195,280,000	192,555,430	98.60%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah			
6036.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal																	
31	051 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan	Berdasarkan Surat Resmi KemenPANRB, Penilaian RB disederhanakan mekanismenya maka Perkin di revisi karena target output tidak dapat dihitung.	99.99	Dokumen	6	6		1,317,365,000	1,314,935,112	99.82%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah			
6036.EBA.962 - Layanan Umum																	
32	051 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Pelaksanaan	telah berjalan dengan baik	99.99	Layanan	1	1		3,384,092,000	3,380,485,759	99.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah			
6036.EBA.994 - Layanan Perkantoran																	
33	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	telah berjalan dengan baik	99.99	Layanan	12	12		7,273,528,000	7,268,032,834	99.92%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala			
34	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Gaji & Tunjangan telah dibayarkan sampai Bulan Desember 2023	99.99	Layanan	12	12		17,150,698,000	16,808,884,194	98.01%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah			
6036.EBB.951 - Layanan Sarana Internal																	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			ANGGARAN			STATUS KEMANFAATAN		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Riil	Alokasi	Real	%	Status Kemanfaatan	Kategori	Keterangan
35	051 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pelaksanaan	tidak ada pengadaan peralatan fasilitas perkantoran pada bulan ini	99.99	Unit	1	1		393,600,000	393,595,500	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6036.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
36	051 Pengelolaan SDM Inspektoral Jenderal	Pelaksanaan	telah dilaksanakan capacity building karyawan ltjen oleh motivator Merry Riana	99.99	Orang	105	105		738,210,000	737,675,091	99.93%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6036.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
37	051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Pelaksanaan	"1. Penyiapan Bahan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Pembahasan Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 2. Penyusunan Narasi dan Finalisasi Konsep PKPT Inspektoral Jenderal Tahun Anggaran 2024. 3. Identifikasi awal Renja Inspektoral Jenderal Tahun Anggaran 2025"	99.99	Dokumen	1	1		8,200,000	8,180,000	99.76%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6036.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
38	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	telah selesai laporan evaluasi bulan Desember, PP 39 ltjen dan PP 39 Set ltjen 2023	99.99	Dokumen	10	10		4,900,000	4,876,000	99.51%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah yg berarti
6036.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
39	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	telah berjalan dengan baik	99.99	Layanan	12	12		3,600,000	3,594,180	99.84%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
6036.EBD.965 - Layanan Audit Internal														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil		ANGGARAN			STATUS Kemanfaatan		PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real	%	Kategori	Keterangan				
40	051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Pelaksanaan	Tindak lanjut hasil pengawasan telah mencapai target	99,99	Dokumen	1	1	89,350,000	89,261,900	99,90%	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah				

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja Inspektorat I



Bayu Fajar Nugroho



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS